

Fahri Hamzah: Pembangunan Rumah Rakyat Berpenghasilan Rendah Jadi Prioritas Pemerintahan Prabowo – Gibran

written by Kabar 6 | 30 Oktober 2024



[Kabar6](#) – Pembangunan rumah rakyat, terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah, menjadi hal sangat penting pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sebab, hal ini menjadi program prioritas dari Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.

Hal itu disampaikan Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Pemukiman ([PKP](#)) Fahri Hamzah yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat ([Gelora](#)) Indonesia usai menghadiri Rapat Kerja di Komisi V DPR, Selasa (29/10/2024) sore.

Menurut Fahri Hamzah, Prabowo bertekad untuk memperhatikan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman secara lebih mendalam dan akurat. Karena itulah dibentuk Kementerian PKP untuk mewujudkan program prioritas tersebut.

**Baca Juga: [Puncak Hari Oeang RI, Kemenkeu Satu Banten Gelar Bazar UMKM di Tangsel](#)

Selain itu, Fahri Hamzah juga menyatakan bahwa tujuan pembangunan tiga juta unit rumah tersebut, untuk mengentaskan rumah tidak layak huni milik masyarakat.

“Ini sekaligus berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Program pembangunan tiga juta rumah, masih menurut Wamen PKP Fahri Hamzah, merupakan salah satu visi yang disampaikan Presiden Prabowo pada kampanye Pilpres 2024.

“Rumah – rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah itu akan dibangun di pedesaan, pesisir, dan perkotaan,” katanya.

Fahri Hamzah menegaskan, hingga saat ini masih banyak keluarga di Indonesia yang masih tinggal di rumah tidak layak huni, bahkan hidup tanpa tempat tinggal.

Hal ini tentu saja sangat memprihatikan. Ia mengajak seluruh pihak, termasuk generasi muda untuk lebih peduli terhadap kondisi perumahan dan kawasan permukimannya. Sehingga setiap masyarakat bisa tinggal di rumah layak huni.

Melalui Kementerian PKP, imbuhnya, pemerintah harus menyiapkan organisasi yang siap untuk melaju dan berjalan lebih cepat di sektor perumahan.

Adanya dukungan dan kerjasama dan niat baik dari semua pihak maka persoalan tersebut diharapkan bisa di selesaikan dengan sebaik – baiknya.

“Inilah cita – cita bangsa yang terpatri dalam pembukaan UUD. Mudah – mudahan memberikan makna yang terasa kembalinya jiwa – jiwa muda anak Indonesia, untuk kerja lebih kuat dan lebih keras dalam mencapai dan menggapai cita – cita bersama,” ungkapnya.

Seperti diketahui, Kementerian Perumahan Rakyat dan Kawasan Perumahan dalam program kerja 100 hari menargetkan pembangunan 2.100 unit rumah khusus untuk pejuang/warga eks

Timor – Timur di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur ([NTT](#)).

Selain itu, 1.874 unit hunian tetap hasil pembangunan PPR dan mitra non pemerintah untuk warga terdampak bencana gempa dan tsunami di Palu, Sigi, Donggala, Sulawesi Tengah ([Sulteng](#)).

Lalu, 140 unit hunian tetap untuk warga terdampak bencana banjir di Agam dan Tanah Datar, Sumatera Barat ([Sumbar](#)).

Kemudian 287 unit hunian tetap untuk warga terdampak erupsi Gunung Ruang di Sulawesi Utara ([Sulut](#)), dan 49 unit hunian tetap untuk warga terdampak banjir/longsor Ternate, Maluku Utara ([Malut](#)).

****Baca Juga: [Kejagung Beberkan Kasus Korupsi Impor Gula yang Jerat Tom Lembong](#)**

Selanjutnya, 36 unit rumah tapak jabatan menteri (RTJM) dan 47 tower rusun ASN – Hankam di Ibu Kota Negara ([IKN](#)) Nusantara, Kalimantan Timur ([Kaltim](#)).

Terakhir satu tower rusun Kementerian Keuangan ([Kemenku](#)), Denpasar, Bali dan satu tower rusun Yayasan [Universitas Madura](#) di Pamekasan, serta bantuan PSU di Kabupaten Lebak ([Banten](#)), Bandung ([Jawa Barat](#)), Sigi ([Sulawesi Tengah](#)), Minahasa ([Sulawesi Utara](#)) dan Kabupaten Maros ([Sulawesi Selatan](#)). (Red)